RIP Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat



Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 435 TAHUN 1443 H/2021 M
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pengembangan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar maka di pandang perlu untuk menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
8. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Rencana Strategis Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 20 Juni 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 10 Dzulqa'idah 1442 H
21 Juni 2021 M

Dekan,

Dr.Aminah, S.Ag.,M.Si
NBM. 774 234

Tembusan kepada yang terhormat:
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Arsip

FAKULTAS AGAMA ISLAM 2021-2025

Disusun oleh FAI Unismuh
Lt. 7 FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Pengarah:

1. **Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si**
   (Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM, Unismuh Makassar)
2. **Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA**
   (Wakil Dekan 1 FAKULTAS AGAMA ISLAM, Unismuh Makassar)
3. **Drs. H. Abd Samad T, M.Pd.I**
   (Wakil Dekan 2 FAKULTAS AGAMA ISLAM, Unismuh Makassar)
4. **Elli Oscar, S.Pd.I., M.Pd.I**
   (Wakil Dekan 3 FAKULTAS AGAMA ISLAM, Unismuh Makassar)
5. **Yakub, S.Pd.I., M.Pd.I**
   (Wakil Dekan 4 FAKULTAS AGAMA ISLAM, Unismuh Makassar)

Tim Penyusun

1. Hurriah Ali Hasan, SE., M.T., Ph.D
2. Nurhidaya, S.Pd.I., M.Pd.I
3. Mursyid Fikri, S.Pd.I., M.Pd.I
4. Alamsyah, S.Pd.I., MH
5. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S
6. Nurfadillah Amin, S.Pd.I., M.Pd.I
7. Hasanuddin, SE.Sy., ME
8. Aliman, Lc., M.Phil.I

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga **"Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2021-2025"** dapat selesai sesuai batas waktunya. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat ini meliputi Pendahuluan, Landasan Pengembangan Unit Kerja, Garis Besar RIP Unit Kerja, Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja, Pelaksanaan RIP Unit Kerja dan Penutup.

Sebagai upaya peningkatan kualitas Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang bernilai manfaat maka Pengabdian kepada Masyakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memiliki kedekatan dengan dunia industri, pemerintahan, masyarakat serta mempunyai kontribusi yang nyata untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Masyarakat khususnya di wilayah Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan mitra terdekat kami.

Dokumen RIPkM ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kompas bagi pengabdi dalam melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat. Dokumen RIPkM ini juga sebagai landasan pemberdayaan potensi dan kemandirian masyarakat dalam rangka mencapai derajat kemandirian yang optimal berbasis pada riset dan potensi lokal. Semoga RIPkM ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang memfasilitasi terwujudnya Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini.

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag. M. S.i.
NBM. 774 234

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Rencana Induk Pengembangan kepada Masyarakat (RIPkM) FAI Unismuh 3
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM **7**
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar 7
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Agama Islam 8
BAB III SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA **9**
3.1 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja PkM FAI Unismuh 10
3.2 Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat FAI Unismuh 11
3.3 Prinsip Pendekatan PkM FAI Unismuh 12
3.4 Indikator Kinerja 17
BAB IV PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **26**
4.1 Hasil Evaluasi SWOT 26
4.2 Pelaksanaan RIPkM FAI Unsimuh 26
4.3 Penguaatan system informasi RIPkM 33
BAB V PENUTUP **34**
DAFTAR PUSTAKA **35**
LAMPIRAN DAFTAR PKM FAI UNISMUH **36**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis SWOT 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Tri Dharma Perguruan Tinggi 1
Gambar 1.2 Sustainable Development Goals (SDGs) 5
Gambar 3.1 Prinsip Pendekatan Pengabdian Pada Masyarakat FAI Unismuh 13
Gambar 3.2 Prinsip Pendekatan Pengabdian kepada Masyarakat FAI Unismuh 15
Gambar 3.3 Fase-fase Perkembangan Kemandirian Masyarakat 16
Gambar 3.4 Perkembangan Kemandirian Masyarakat 17
Gambar 3.5 Indikator Kinerja PkM Perguruan Tinggi 19
Gambar 3.6 Arah Pengembangan RIPkM FAI Unismuh 20
Gambar 3.7 Road Map RIPkM Unismuh Makassar 21
Gambar 3.8 Road Map RIPkM FAI Unismuh 22
Gambar 3.9 Data Pemerolehan Hibah PkM Internal FAI 2017-2020 24
Gambar 3.10 Data Pemerolehan Hibah PkM Eksternal FAI 2017-2020 24
Gambar 4.1 Standar PkM 27

BAB I
PENDAHULUAN

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 berkenaan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mewajibkan setiap perguruan tinggi memiliki rencana strategis (Renstra) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Renstra dimaksud disusun dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi serta disusun dalam sebuah Rencana Induk Penelitian atau Pengabdian Pada Masyarakat. Renstra ini disusun sebagai panduan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka menengah di lingkungan civitas akademika universitas padjadjaran. Secara Eksternal, penyusunan Renstra ini juga disesuaikan dengan program prioritas baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Program Prioritas pengabdian dari Kementerian Riset dan Teknologi BRIN, dan mendukung program Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Renstra ini juga bisa digunakan sebagai payung hukum kegiatan kerjasama Pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika Unismuh dengan Institusi nasional maupun Institusi Internasional sesuai dengan tema kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1.1 Skema Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan sekuensial dari pendidikan dan penelitian yang terikat dalam tridharma perguruan tinggi (Gambar 1), di mana ketiga aspek tridharma perguruan tinggi ini harus selalu dilandasi dengan Inovasi yang akan membuat akselerasi Tri Dharma pendidikan tinggi cepat tercapai. Secara filosofis, PkM merupakan wujud konkret dari penerapan ilmu (*axiology*) yang bersifat siklus (*cyclic*) atau umpan balik (*feed back*), sehingga "jika dilaksanakan dengan baik, benar, sistematis dan konsisten (sesuai peta jalan dan rencana strategis)", maka hasilnya bukan hanya memberdayakan dan memandirikan masyarakat serta menguatkan daya saing bangsa, tetapi akan semakin membangun (mengkonstruksi) dan menguatkan aspek pendidikan dan penelitian dalam tri dharma perguruan tinggi. Secara teoritis maupun praktis, PkM potensial dilakukan dalam satu bidang ilmu (monodisiplin), antar bidang ilmu serumpun (interdisiplin), ragam bidang ilmu terkait (multidisiplin) dan antar bidang ilmu yang berlainan (transdisiplin), sehingga dapat mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh potensi institusi dalam ikatan (bonding) kerja sama inter dan antar pelaku keilmuan. Secara praktis, PkM bersifat umum, artinya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai ruang lingkup dan kondisi masyarakat (baik di perkotaan, di pinggiran perkotaan maupun di pedesaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri), dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait (mitra atau *stakeholders*), serta dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.

PkM Idealnya dilaksanakan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan luaran (*outcome*) yang jelas dan terukur bagi lembaga pendidikan tinggi, baik dalam internalisasi dan institusionalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi maupun komersialisasi inovasi, baik dalam pengembangan pendidikan maupun penelitian, baik dalam integrasi ilmu maupun kolaborasi institusi. PkM yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, baik bidang ilmu, pendekatan, sasaran maupun lokasi, diyakini akan berdampak nyata dan berlipat (*multiplier effect*) terhadap masyarakat yang diberdayakan. Mengadaptasi strategi pemberdayaan (*empowerment*) atau pengembangan masyarakat (*community development*), PkM yang terencana, konsisten dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi terbangunnya masyarakat yang berdaya dan mandiri, yang bukan hanya membuktikan fungsi tridharma, tetapi melekatkan institusi pendidikan tinggi pada seluruh dimensi masyarakat. Mewujudkan keberhasilan (*outcome*) PkM yang berkelanjutan pada masyarakat yang diberdayakan seharusnya menjadi orientasi dan landasan utama

perguruan tinggi untuk melakukan eskalasi dan reflikasi PkM ke lingkungan yang lebih luas, seperti PkM wilayah perbatasan, PkM pulau terpencil, memberdayakan hasil produksi pertanian di pedesaan dan peningkatan wirausaha mandiri dan bahkan dalam era keterbukaan (konektifitas) membuka peluang bagi terselenggaranya PkM yang bersifat lintas batas.

1.1. Rencana Induk Pengembangan kepada Masyarakat (RIPkM) FAI Unismuh

RIP Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Agama Islam disusun dan dikembangkan berdasarkan RIPkM Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Fakultas Agama Islam adalah Catur Dharma Perguruan Tinggi, dimana salah satu bagiannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai tahun 2013 melaksanakan kebijakan desentralisasi pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari desentralisasipengabdian kepada masyarakat adalah perwujudan kontribusi kepakaran ilmu kepada masyarakat, meningkatkan jumlah partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi. Implikasi kebijakan ini melimpahkan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat secara bertahap kepada perguruan tinggi.

Untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendesentralisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi di atas maka arahan kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Agama Islam dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) 2021. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (RIPkM) yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahun (2021-2025). RIPkM adalah dokumen formal yang berisi visi, strategi pencapaian dan tema pengabdian kepada masyarakat yang harus diacu oleh pengabdi didalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. RIPkM 2021-2025 merupakan dokumen formal perencanaan jangka pendek dan menengah yang mengacu kepada statuta, renstra, rencana induk pengembangan Fakultas Agama Islam yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. RIPkM ini ditujukan bagi dosen tetap di lingkungan Fakultas Agama Islam yang akan menyusun usulan pengabdian kepada masyarakat.

Road map pengabdian kepada masyarakat dalam RIPkM ini disusun berdasarkan pemetaan potensi pengabdian kepada masyarakat dalam lima tahun terakhir (tahun 2021 sampai dengan tahun 2025). Pemetaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) topik danjudul pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari internal Program Studi dan eksternal (Fakultas/Universitas/Ditlitabmas), (2) kualifikasi akademik sumber daya manusia yang banyak mendukung bidang pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan, (3) bidang pengembangan keilmuan masing-masing dosen di Fakultas Agama Islam, (4) sarana pendukung pengabdian kepada masyarakat (laboratorium, daerah mitra dan pusat studi), (5) jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat, antara lain publikasi ilmiah dalam bentuk artikel dalam jurnal nasional, HKI, Hak Cipta atau Patent.

Prosedur pemetaan pengabdian kepada masyarakat tersebut melibatkan seluruh civitas akademik Fakultas Agama Islam dengan mendatapengabdian kepada masyarakat yang telah dihasilkan serta produk pengabdian kepada masyarakat (publikasi, HKI, teknologi tepat guna, proseding, maupun modul/ buku ajar) dalam 4 tahun terakhir, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Beberapa unggulan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kuantitas dan kualitas memadai, diusulkan menjadi program yang akan dijalankan pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) tersebut. Peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang akan diusulkan dalam RIPkM diharapkan dapat menjadi acuan program pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

Tujuan dari pembuatan RIPkM ini untuk menjawab permasalahan pengelolaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat, seperti memberikan arah kebijakan pengembangan pengabdian kepada masyarakat kedepan, kajian dan topik pengabdian kepada masyarakat yang akan dikembangkan, serta target dan sasaran kegiatan pengabdian Fakultas Agama Islam. Penyusunan dokumen RIPkM didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Fakultas Agama Islam.

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) merupakan salah satu rencana strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan Rencana Induk Penelitian (RIP), sistem pembelajaran, kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional, bahkan dengan kebijakan internasional, yang salah satunya berkaitan dengan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. RIPkM berisi tentang program perencanaan, pengalokasian, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya yang tersedia, baik

sumberdaya manusia yang dikemas dalam program akademisi masuk desa, maupun aplikasi dan diseminasi ragam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan usaha produk intelektual kampus yang dihasilkan akademisi dari proses pendidikan dan penelitian berupa, baik secara monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin maupun transdisiplin, berdasarkan pertimbangan analisis efektifitas dan *outcome mapping* (input, *process, output*, *impact, outcome*) untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat melalui program kolaborasi mitra desa maupun kerjasama dengan pihak manapun dalam rangka kegiatan pengabdian dan pendampingan wirausaha mandiri.

RIPkM, baik sebagai sebuah proses maupun kelengkapan (*tools*), merupakan identitas eksistensi institusi, arah kebijakan dan sarana pengambilan keputusan dalam pengabdian masyarakat untuk beberapa periode (5, 10 dan 25 tahun) ke depan. Penentuan jarak waktu didasarkan kepada dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan penyusunan RIPkM di FAI Unismuh didasarkan pada berbagai kebijakan tentang penelitian dan pengabdian di tingkat internasional yang terkait dengan SDGs, kebijakan di tingkat nasional yang terkait dengan Rencana Strategis Dirjen Dikti Kemendikbud, Kebijakan Prioritas Kemenristek BRIN, program Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi, kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang terkait dengan 9 tujuan bersama (*common goals*) dan kebijakan Unismuh Makassar sendiri (Gambar 1.2).



Gambar 1.2 *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Terdapat 17 tujuan dari SDGs, yaitu:

1. Penghapusan Kemiskinan (No Poverty);
2. Penghapusan Kelaparan (Zero Hunger);
3. Kesehatan Dan Kesejahteraan (Good Health And Well-Being);
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education);
5. Kesetaraan Gender (Gender Equality);
6. Air Dan Sanitasi Yang Bersih (Clean Water And Sanitation);
7. Energi Yang Murah Dan Bersih (Affordable And Clean Energy);
8. Pekerjaan Yang Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work And Economic Growth);
9. Industri, Inovasi Dan Infrastruktur (Industry, Innovation And Infrastructure);
10. Mengurangi Ketidaksetaraan (Reduced Inequalities);
11. Kota Dan Komunitas Yang Berkelanjutan (Sustainable Cities And Communities);
12. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab (Responsible Consumption And Production);
13. Tindakan Untuk Perubahan Iklim (Climate Action);
14. Kehidupan Air (Life Below Water);
15. Kehidupan Darat (Life On Land);
16. Perdamaian, Keadilan Dan Institusi Yang Kuat (Peace, Justice, Strong Institutions);
17. Kemitraan (Partnership For The Goals).

BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Rencana Induk dan Rencana Strategi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FAI Unismuh disusun berlandaskan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Unismuh Makassar dan FAI Unismuh. Secara operasional, didasarkan pula atas Sasaran, Program Strategi dan Indikator Kinerja PkM. Hal yang tidak kalah penting adalah landasan konseptual dan operasional pengembangan PkM, yakni prinsip-prinsip pendekatan PkM yang akan menjadi kerangka acuan bagi semua pihak dalam mengimplementasikan PkM. Dalam Bab ini, indikator keberhasilan PkM ditempatkan sebagai landasan pengembangan, karena terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian-capaian PkM.

2.1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi ***Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri*** *Pada Tahun 2024"*

MISI

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan danketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni danmasyarakat

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri;
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian;
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah;

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

2.2. Visi, Misi, Tujuan FAKULTAS AGAMA ISLAM

VISI

"*Mewujudkan insan akademik yang berwawasan nilai-nilai Islami, unggul, terpercaya dan kompetitif pada Tahun 2024*"

MISI

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar mengembang misi dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melalui :

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang professional.
2. Melaksanakan penelitian (riset) dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
3. Menjalin kemitraan dengan berbagai instansi dalam rangka peningkatan mutu dan penyerapan alumni.
4. Mengembangkan potensi mahasiswa sebagai kader bangsa, kader umat, kader persyarikatan dan cendekiawan muslim.
5. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, konsultasi, penyuluhan, pendampingan dan sosialisasi untuk kemaslahatan ummat.

TUJUAN

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar bertujuan menghasilkan lulusan, yaitu melalui:

1. Menghasilkan tenaga professional dalam bidangnya yang berkualitas dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan tenaga professional yang mampu mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang inovatif.
3. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai Lembaga dan instansi terkait berlandaskan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Fakultas Agama Islam memiliki visi "*Mewujudkan insan akademik yang berwawasan nilai-nilai Islami, unggul, terpercaya dan kompetitif pada Tahun 2024*". Sedangkan misinya dijabarkan sebagai berikut: 1) Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang professional. 2) Melaksanakan penelitian (riset) dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. 3) Menjalin kemitraan dengan berbagai instansi dalam rangka peningkatan mutu dan penyerapan alumni. 4) Mengembangkan potensi mahasiswa sebagai kader bangsa, kader umat, kader persyarikatan dan cendekiawan muslim. 5) Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, konsultasi, penyuluhan, pendampingan dan sosialisasi untuk kemaslahatan ummat.".

Organisasi tata kelola UPPS FAI Unismuh dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh empat wakil dekan yang terdiri dari Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama, Wakil Dekan II Bidang Sumberdaya dan Keuangan, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Wakil Dekan IV Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Merajuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka penelitian dan pengabdian pada Masyarakat merupakan bagian yang sangat strategis perannya di era kompetisi tinggi (*hyper-competitive*) ini. Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, harus mampu mengembangkan atmosfir akademik berbasis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Seluruh komponen FAI Unismuh, baik mahasiswa maupun dosen harus terlibat kegiatan PkM.

Dalam konteks ini, FAI Unismuh merupakan unit yang bertugas mengelola seluruh kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat agar pelaksanaan dan keluaran kegiatannya dapat dilihat sebagai tampilan visi fakultas. Selain itu, karena kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari banyak komponen lain dari fakultas dan masing-masing komponen berwenang terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengabdian secara utuh. Fakultas Agama Islam mengemban misi akademik dan dakwah. Karena itu, berbagai kiprah, dinamika program serta kegiatannya konsisten dengan pertumbuhan, perubahan dan pembaharuan.

3.1. Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja PkM FAI Unismuh

Sasaran, program strategis dan indikator kinerja Rencana Induk Pengabdian Masyarakat FAI Unismuh mengacu kepada Visi, Misi dan Tujuan RIPkM FAI Unismuh.

1. Mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, memantau dan menilai serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional;
3. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional;
4. Mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi produk (fisik dan non fisik) dan atau perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
5. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Membangun sistem informasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan proses pembelajaran;
8. Mengembangkan budaya akademik dan kewirausahaan;
9. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan FAI Unismuh adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu “Teraihnya Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat” yang dijabarkan ke dalam:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama dengan *stakeholders*;
4. Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi produk (fisik atau non fisik) dan/atau perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Kegiatan Pendampingan Wirausaha.

5. Terdesiminasinya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Stakeholders;
6. Terbangunnya sistem informasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat;
7. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan proses pembelajaran;
8. Terbentuknya budaya akademik dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan civitas akademika FAI Unismuh;
9. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Berkembangnya Usaha Produk Intelektual kampus

3.2. Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat FAI Unismuh

Terciptanya standar mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yaitu: 1) Tercapainya jumlah dosen untuk menghasilkan penemuan penelitian luar biasa (inventor), 2) Tercapainya penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan (CSR), 3) Tercapainya kegiatan PkM, yang selanjutnya dielaborasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama serta interaksi sinergis berbagai unit di FAI Unismuh dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan maupun untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang berkemampuan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, bermoral, dan beretika tinggi, yang didukung oleh prasarana dan sarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memadai.
3. Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diunggulkan dan memperoleh pengakuan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Meningkatnya kerja sama (kemitraan) dengan berbagai instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penguasaan, pemanfaatan hasil penelitian dan PkM, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat memberdayakan

masyarakat dalam berbagai bidang termasuk peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan kewirausahaan.

3.3. Prinsip Pendekatan PkM FAI Unismuh

Prinsip PkM yang diacu oleh FAI Unismuh adalah keadilan sosial dan kemaslahatan ilmu pengetahuan dan teknologi, prinsip pengembangan masyarakat (*community development*) yang mencakup penyuluhan (*extension*) dan pemberdayaan (*empowerment*), prinsip berpikir alternatif: sistem, kritis, estetis dan ekologis (*ecologically, aesthetics, critical and system thinking*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan ilmu pengetahuan dan teknologi diwujudkan dalam bentuk akademisi masuk desa yang merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari konsep membangun dari pinggiran atau membangun dari desa.

Pengembangan masyarakat (*community development*) yang diadopsi dalam PkM Unismuh adalah *community-driven development*, yakni " suatu proses inisiasi, pengorganisasian dan pengambilan tindakan (termasuk keputusan) di dalam kelompok masyarakat (*doing with the community*) untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama (*common interests and goals*)". Pengembangan masyarakat dapat diimplementasikan melalui dua mekanisme (*outreach mechanism*) yakni penyuluhan (*extension approach*) dan pemberdayaan (*empowerment approach*).

Penyuluhan (*extension approach*) merupakan proses pembelajaran berkelanjutan bagi masyarakat agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses sumberdaya-sumberdaya produktif, baik informasi, teknologi, permodalan, hukum, kebijakan, pasar, energi, pangan, layanan kesehatan dan lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan atau menguatkan kreatifitas dan keinovatifannya, produktivitas dan efisiensi usahanya, pekerjaan dan pendapatannya, sosial budaya dan kelembagaannya, kesadaran dan aksinya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kesejahteraan dan kebahagian. Wujud implementasinya dapat berbentuk fasilitasi, mediasi, pendampingan, inisiasi, internalisasi dan institusionalisasi (design). Sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, penyuluhan tidak dapat dilakukan secara instan dan tergesa-gesa, karena akan menyesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan dan perkembangan di lapangan.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan proses berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan dan menguatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya produktif, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi, menguatkan tanggung jawab atau tanggung

gugat (*accountability*) dan membangun kapasitas kelembagaan (*capacity building*). Sebagai sebuah proses, pemberdayaan pada hakekatnya adalah membangun kesaling tergantungan (*interdependency*) dan membuang ketergantungan (*dependency*), untuk menumbuhkan keberdayaan agar terbangun kemandirian. Sebagai proses yang adaptif, implementasi pemberdayaan dalam PkM dapat berwujud pemungkinan (*enabling*), penguatan (*strengthening*), pengembangan (*improvement*), perlindungan (*advocating*) dan pembaruan menuju keberlanjutan (*innovation*).



Gambar 3.1 Prinsip Pendekatan Pengabdian Pada Masyarakat FAI Unismuh

Mengembangkan masyarakat dari kondisi lemah (*powerless*), ketergantungan (*dependency*) menuju keberdayaan (*independency*) dan kemandirian (*interdependency*) merupakan proses yang bertahap dan berkelanjutan, yang dalam praktiknya membutuhkan kesiapan-kesiapan (*readiness*), mulai dari kesiapan personal, sosial, lingkungan, SDM, keuangan, produksi, teknologi, aset, manajemen, pasar dan modal sosial (terutama jejaring dan kelembagaan). Tentu saja dalam prosesnya, tidak harus selalu berangkat dari titik kesiapan awal, untuk kasus-kasus tertentu dapat berangkat dari titik kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Pada kenyataannya, terutama untuk yang *on going process*, pemberdayaan dapat berangkat dari penguatan atau perlindungan.

Beberapa prinsip pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang adaptif dan digunakan dalam PkM FAI Unismuh adalah: partisipatif (*demand driven*), integratif (*integrated and convergence*), humanis (*human right*), berkelanjutan (*sustainability*), konsisten dan komitmen (*commitment*), memberdayakan (*empowerment*), membangun kemandirian lokal (*self reliance*), demokratis (*democration*), kerjasama (*cooperation, collaboration*), menyeluruh (*comprehensive*), membangun kapasitas personal, komunitas

dan kelembagaan (*capacity building*), berjejaring (*networking*), otonom (*outonomus*) dan dinamis (*dynamic*).

Prinsip berpikir sistem (*system thinking*) merupakan proses berpikir (belajar) yang memperhatikan keterbukaan (*openness*), keterpaduan (*integrated*), keseimbangan (*equilibrium*), kesalingtergantungan (*interdependency*), kompleksitas (*complexity*), umpan balik (*feed-back*) dan keseluruhan (*holistic*) subsistem. Mengadaptasi konsep berpikir sistem, maka PkM dalam proses dan praktiknya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi sistemik dan sistematis. Pada kenyataannya, persoalan (tuntutan kebutuhan dan permasalahan) dalam *social system* dan *eco-system* saling terkait satu sama lain, sehingga PkM didesain secara terintegrasi dan sekuensial dari proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin sampai transdisiplin.

Berpikir kritis (*critical thinking*) merupakan proses berpikir alternatif dan berpikir dengan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks ini, berpikir kritis dipandang sebagai pemikiran yang didesain, didisiplinkan, dievaluasi dan dikoreksi secara sendiri, baik oleh individu maupun komunitas. Berpikir kritis penting agar PkM menjadi berguna, menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi dan kesimpulan. Berpikir kritis penting diadaptasi dalam PkM karena lekat dengan empati (kemampuan mengkonstruksi pemahaman yang lebih dari sekedar perspektif) dan *critical detachment* (kemampuan mendeteksi bias, sehingga terhindar dari penumpukan pemahaman dalam mewujudkan keseimbangan argumen serta bagaimana berbagai tujuan dapat difasilitasi). Prinsip berpikir kritis yang diadopsi dalam PkM FAI Unismuh adalah berpikir alternatif, bertindak empati dan teguh pendirian (*critical detachment*).

Berpikir estetis (*aesthetic thinking*) adalah berpikir seni (*artistic thinking*), berpikir desain (*design thinking*) dan berpikir arsitektur (*architecture thinking*). Berpikir estetis identik dengan berpikir kreatif dan paradigma artistik, yakni model pencarian dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (kebenaran, kearifan, keindahan) dengan membiarkan pikiran bergerak dinamis di dalam ketidakteraturan (*chaotic, disorder*), tetapi kemudian mencari keseimbangan (*equilibrium*) di dalam apa yang disebut dengan tepian chaos (*the edge of chaos*) yang sudah terkandung secara intuitif nilai-nilai etika, kearifan, keindahan dan spiritualitas. Prinsip berpikir estetis yang diadopsi dalam PkM FAI Unismuuh adalah menghasilkan ide kreatif dan kebaruan (*novelty*) yang bersifat tanpa akhir (*unfinished*) dan berpikir desain (*design thinking*). Berpikir desain meliputi 5 (lima) yang terdiri dari penemuan

inspirasi (*emphatize phase*), interpretasi (*define phase*), penggalian ide (*ideate phase*), eksperimen (*prototype phase*), evaluasi dan evolusi (*test phase*).

Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dalam terminologi kekinian identik dengan pembangunan lestari, ramah lingkungan, green dan ekologis, yang diadopsi dalam PkM FAI Unismuh adalah keberlanjutan proses (*on going process*), keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial (terutama regenerasi) dan keberlanjutan kelembagaan. Prinsip lainnya adalah pengintegrasian kreasi dan inovasi lokal dengan peluang global (*glocalism*), melibatkan seluruh pihak terkait dan generasi, mengedepankan keseimbangan, holistik, keanekaragaman (*diversity*), kesalingtergantungan (*interdependency*), kerja sama (*interelation*) dan fleksibilitas (adaptif terhadap kondisi yang berubah). Sebagai sebuah proses, PkM tidak akan berhenti pada satu titik, karena perubahan dan tantangan (dinamika) akan senantiasa ditemui dalam setiap perkembangan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

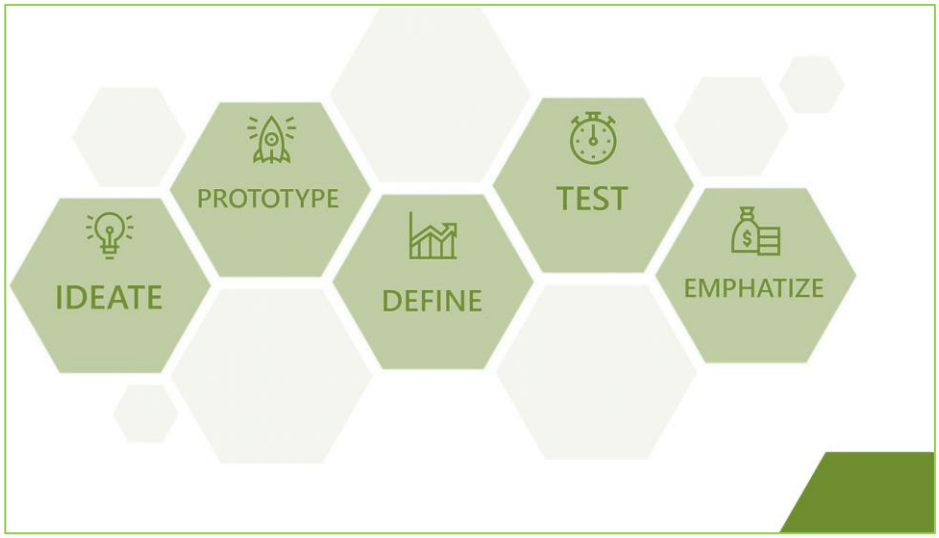

Gambar 3.2 Prinsip Pendekatan Pengabdian kepada Masyarakat FAI Unismuh

Pada kenyataan sosial, berkembang perspektif yang keliru (*fallacy*) tentang pelaksanaan PkM di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (P3M). Tujuan mempengaruhi atau melakukan perubahan perilaku masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi kalau sifat kegiatan hanya menyampaikan informasi atau inovasi, maka tidak cukup untuk disebut P3M. Lebih tepat jika disebut kampanye, promosi, penerangan dan diseminasi informasi. Sebuah kekeliruan mendasar yang boleh jadi terkondisikan oleh sistem atau bersumber dari dangkalnya pemahaman para

pelaku PkM atas paradigma, konsepsi dan proses implementasi P3M. Ironisnya, realitas seperti itu tidak hanya ditemukan pada PkM yang berbiaya rendah, tetapi juga pada PkM unggulan nasional yang berdana besar.

Penting untuk dipahami bahwa PkM merupakan proses dan aksi perbaikan berkelanjutan yang akhir pencapaiannya berujung pada kemandirian. Mewujudkan kemandirian merupakan proses bertahap, yang berarti tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan sekali kegiatan. Ada empat fase yang harus ditempuh partisipan pemberdayaan untuk mencapai kemandirian. Pertama, fase ketergantungan (apatis) masyarakat pada pemberdaya; Kedua, fase transisi, masyarakat sudah memiliki keberdayaan tetapi masih lemah; Ketiga, fase keberdayaan (masyarakat sudah berdaya secara personal); dan Keempat, fase kemandirian (masyarakat berdaya secara personal dan interelasional). Tahapan- tahapan dan fase-fase seperti itu jelas tidak memadai untuk dicapai dengan pendekatan PkM yang diterapkan secara parsial dan karitatif. Tujuan PkM hanya mungkin terwujud apabila pelaku atau institusi memiliki roadmap PkM yang jelas, yang sinergi dengan pendidikan, bidang ilmu dan riset-risetnya (baik monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin maupun transdisiplin), yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan konsisten, baik dari segi tempat, subjek maupun waktu pelaksanaannya.



Gambar 3.3 Fase-fase Perkembangan Kemandirian Masyarakat

Aspek PkM lainnya yang sering dipahami keliru adalah penggunaan metode. Karena tidak mengacu kepada road map, tidak ada konsistensi pelaksanaan dan tempat kegiatan, serta tidak ada integrasi bidang keilmuan, maka penilaian menjadi terabaikan. Implikasinya, setiap dilakukan PkM, meskipun berkali-kali dilakukan oleh orang yang

sama, metodenya tidak pernah berubah, hanya mengulang-ulang yang sebelumnya. Padahal, dalam praktik P3M yang benar, metode yang digunakan akan turut berkembang mengikuti perkembangan tingkat kemandirian masyarakat. Kapan penyuluhan, pelatihan, kursus, magang, sekolah lapang dan pendampingan dilakukan, semuanya akan menyesuaikan dengan hasil penilaian yang dilakukan pada setiap tahapan PkM. Bahkan, untuk kegiatan reflikasi kegiatan PkM, para pemberdaya tidak melakukannya secara sepihak, tetapi berjalan atas dasar kesadaran dalam bentuk efek-efek rembesan (*spillover effect*) serta hasil penilaian, monitoring dan evaluasi partisipatif.

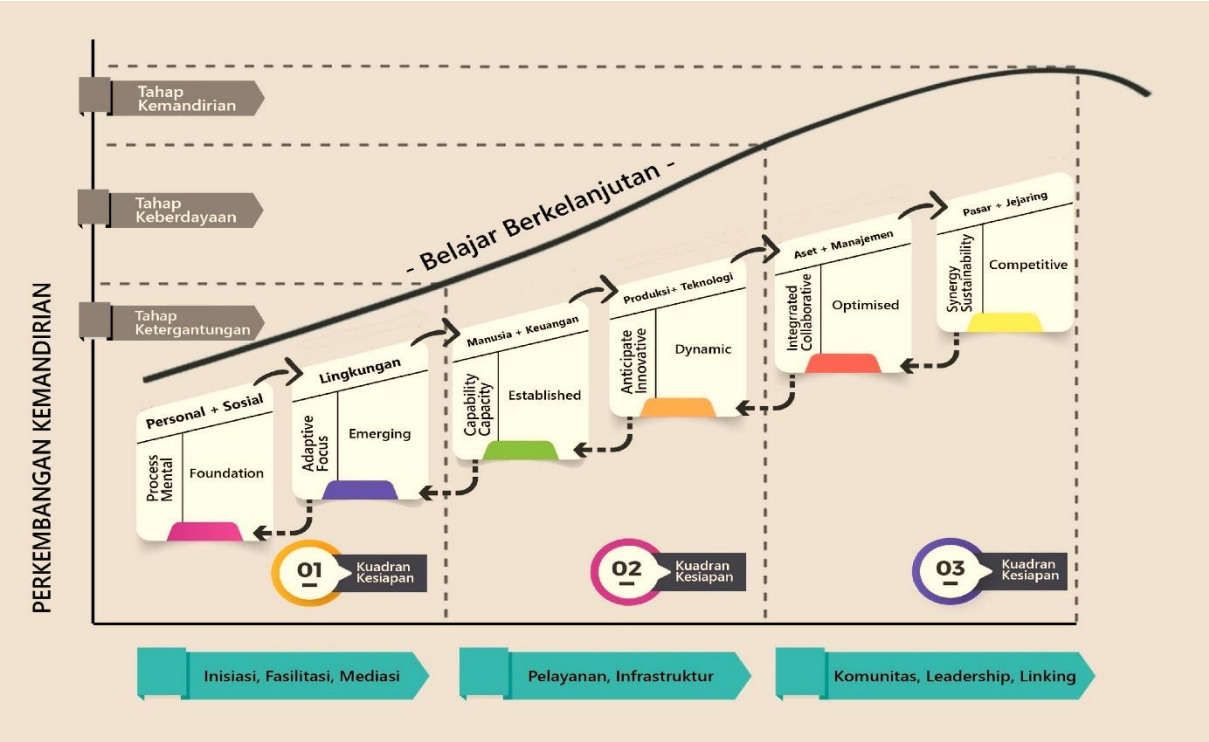

Gambar 3.4 Perkembangan Kemandirian Masyarakat

2.4. Indikator Kinerja

Keberhasilan PkM yang sejati adalah keberhasilan memberdayakan dan memandirikan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh institusi yang memberdayakan. Inilah yang disebut proses integrasi internalisasi dan institusionalisasi, yakni melekatkan atribut FAI Unismuh dengan atribut masyarakat. Bagaimana aksi PkM yang dilakukan oleh FAI Unismuh diakui dan melekat dalam keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Luarannya dapat berupa wirausaha (seperti Koperasi dan UMKM FAI

Unismuh, Student mall Unismuh, kampung kuliner Unismuh, dan lainnya), kampung atau komunitas kreatif (UMKM, klinik kreatif FAI Unismuh), desa binaan FAI Unismuh, daerah binaan FAI Unismuh dan institusi (badan usaha, sekolah, kelompok tani, kelompok nelayan, rumah sakit, koperasi, perguruan tinggi) dan sebagainya.

Namun demikian, dalam upaya mewujudkan mutu dan kuantitas PkM yang relevan dengan agenda riset FAI Unismuh dan pemanfaatan IPTEKS bagi masyarakat melalui peningkatan:

1. Publikasi di tingkat institusional (Unismuh Makassar), nasional dan internasional
2. Kerja sama PkM dengan pemerintah daerah, lembaga pemerintah, perguruan tinggi di daerah, perusahaan swasta dan lembaga swadaya (CSR), baik regional maupun nasional.
3. Perolehan dana hibah PkM, baik dari lembaga pemerintah, swasta dan swadaya regional maupun nasional.
4. Penemuan (inovasi): proses (metode, tools) dan produk (teknologi tepat guna, model, desain dan gagasan) PkM
5. Perolehan HKI dari produk PkM
6. Buku ajar dan buku panduan PkM
7. Meningkatnya Produk Usaha Intelektual Kampus
8. Road Map PkM, baik personal dosen (monodisiplin), interdisiplin dan antar lembaga (multidisiplin dan transdisiplin)
9. Terbangunnya masyarakat, komunitas, desa, daerah dan institusi yang berdaya dan mandiri.

Secara makro, luaran PkM FAI Unismuh juga mengacu kepada indikator kinerja PkM yang dirumuskan secara Nasional dalam Rencana Strategis PkM Nasional sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
2. Prosiding seminar PkM Nasional dan Internasional;
3. Jasa, proses, metode dan produk bernilai ekonomi, sosial dan politik;
4. Artikel PkM dalam jurnal nasional dan internasional;
5. Jasa, proses, metode dan produk bernilai ekologis, hukum dan Hankam;
6. Jasa, proses, metode dan produk bernilai sosial dan budaya;

7. Critical mass Prodikmas perguruan tinggi;
8. Hak kekayaan intelektual (HKI) atau paten

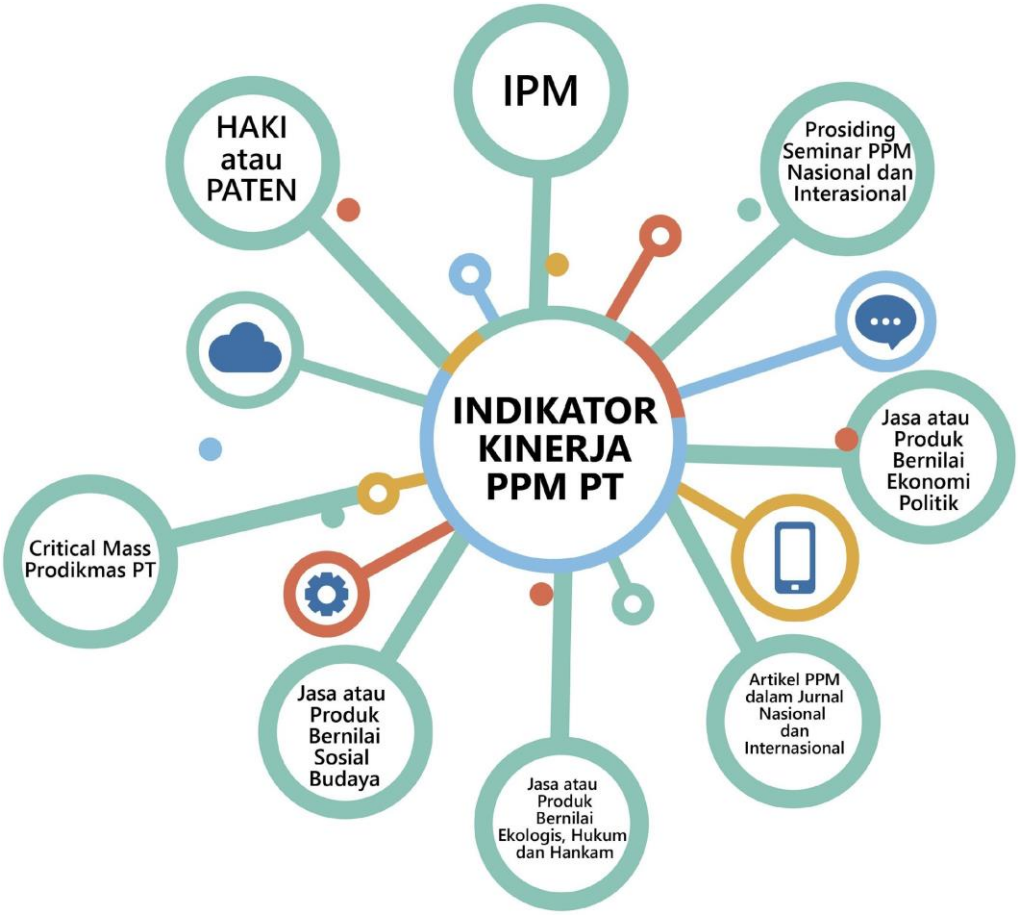

Gambar 3.5 Indikator Kinerja PkM Perguruan Tinggi

Kinerja implementasi RIPkM diukur berdasarkan indikator kinerja yang lebih menitik beratkan pada *output* dan *outcome* hasil pengabdian masyarakat. Pengukuran kinerja pelaksanaan RIPkM dilakukan devisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Agama Islam yang secara periodik.

a. Peta Jalan (*Roadmap*)

Peta jalan (*roadmap*) pengabdian masyarakat, mencakup kegiatan pengabdian masyarakat yang direncanakan, serta rencana arah pengabdian masyarakat dalam kurun waktu yang akan datang. Peta jalan pengabdian masyarakatmerupakan rincian pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Secara ideal peta jalan pengabdian masyarakat akan menjadi sangat berguna apabila memuat penjabaran rinci mengenai rencana kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing

kegiatan, kebutuhan anggaran serta pelaksana kegiatan. Arah pengembangan RIPkM ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Arah Pengembangan RIPkM FAI Unismuh

Landasannya pengembangan program PkM mengacu kepada hasil integrasi proses pembelajaran Catur Dharma (pendidikan, penelitian, pengabdian, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan), produk-produk inovatif yang dihasilkan dari riset yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan hasil monitoring evaluasi PkM yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, PkM di Fakultas Agama Islam ditunjang dengan fasilitas, sistem, pendanaan dan sumberdaya manusia yang diintegrasikan dengan peluang dan dukungan yang bersumber dari berbagai pihak terkait (pemerintah, lembaga pengkajian, dunia bisnis, media dan komunitas) melalui pendekatan *pentahelix* model. Implementasinya dibangun melalui mekanisme kerja sama, baik dengan pemerintah daerah, pelaku bisnis dan komunitas, serta organisasi Otonom Muhammadiyah. Secara administratif,juga didukung dengan tatakelola PkM yang baik dalam struktur DRPM.

Merujuk pada arha pemgembanagn PkM di Universitas Muhammadiyah Makassar, dijabarkanlah peta jalan RIPkM sebagai dasar dalam melaksanakan pengabdian. Peta jalan RIPkM ditunjukkan pada gambar berikut:

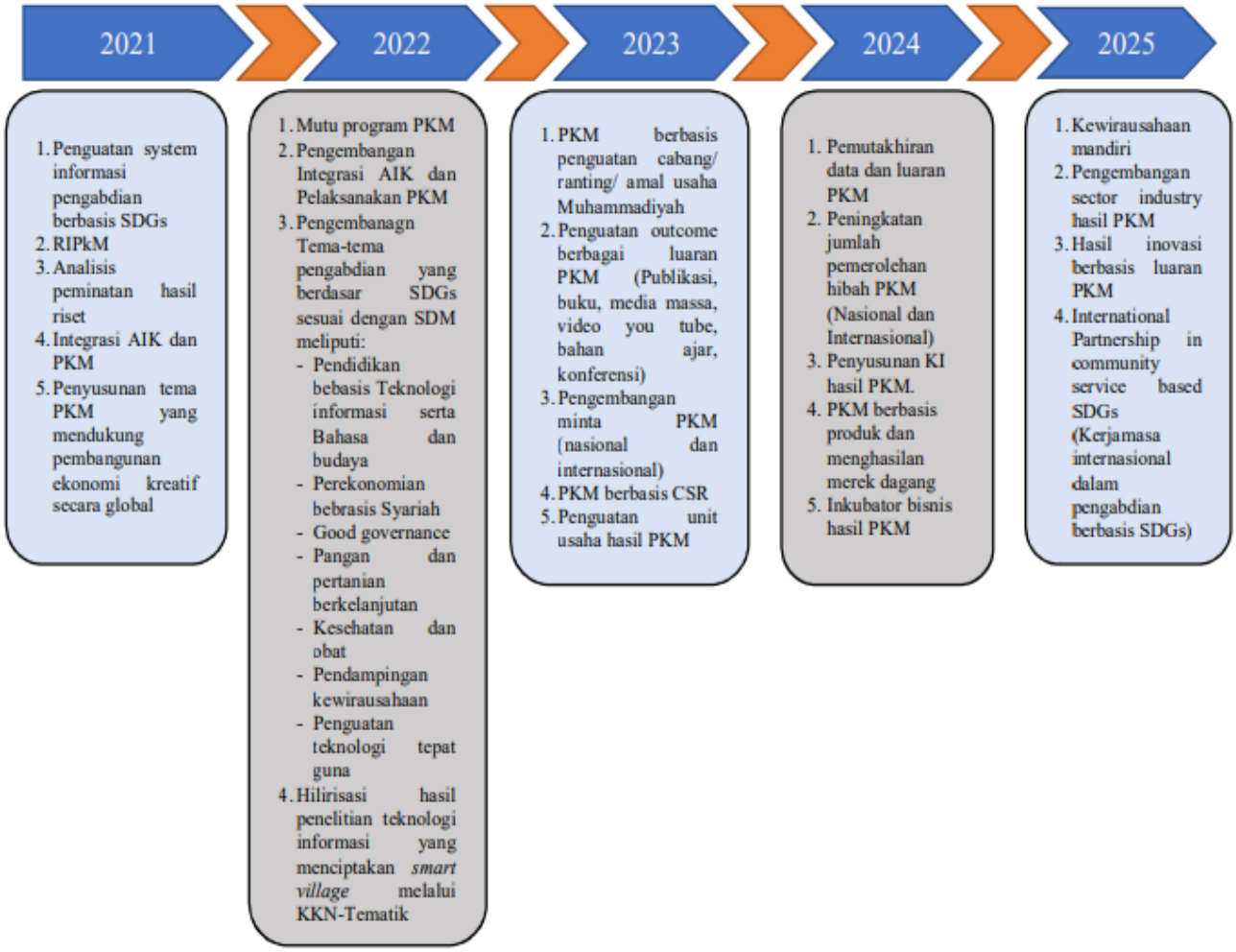

Gambar 3.7 Road Map RIPkM Unismuh Makassar

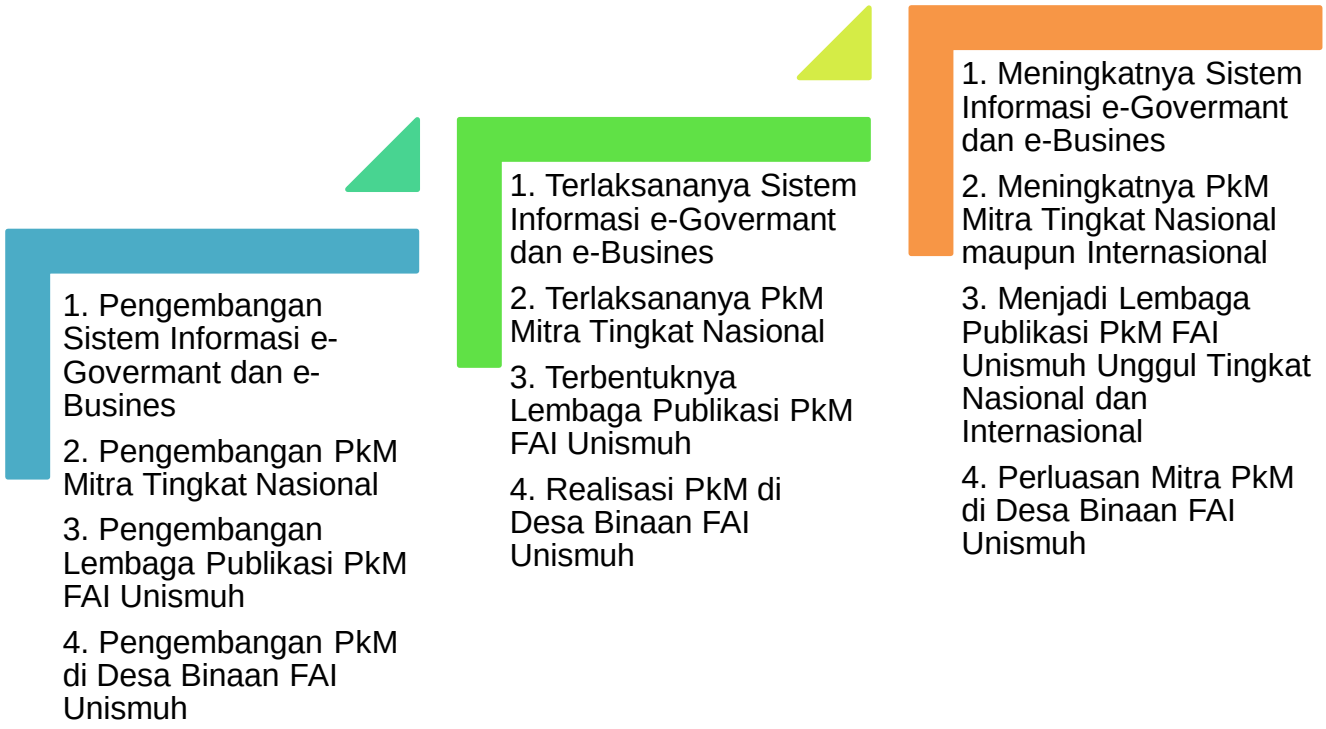

Gambar 3.8 Road Map RIPkM FAI Unismuh

Untuk menguatkan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (RIPkM) ini, disusunlah tema-tema pengabdian yang sesuai dengan kepakaran yang dimiliki oleh FAI Unismuh. Kepakaran ini juga dikaitkan dengan SDGs yang telah ditetapkan secara global. Tema PkM yang dirancang akan memayungi para dosen dalam mengembangkan topik PkM yang ada dalam RIPkM ini. Adapun tema yang dimaksud adalah:

1. Pengembangan system ekonomi berbaisis teknologi dan informasi dengan sasaran amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dibidang ekonomi dan bisnis dan masyarakat umum;
2. Perekonomian berbasis Syariah merupakan tema PkM untuk membantu masyarakat meberikan edukasi pentinya produk halal dan mencegah praktek ribawi;
3. Menciptakan tatanan pelayanan *good governance* dalam sektor pelayanan publik dengan memberikan edukasi terhadap pelaku pelayanan publik;
4. Pendampingan kewirausahaan madiri bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha;
5. Penguatan teknologi tepat guna baik dibidang ekonomi dan bisnis dan system elektronika dan infromasi;
6. Meningkatkan dan mendorong kemampuan dosen FAI Unismuh untuk bekerjasama dengan institusi mitra baik ditingkat nasional maupun internasional;
7. Membangun kolaborasi antar perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil PkM;
8. Penguatan KKN-Tematik integrative berbasis pengabdian baik KKN-MAS, KKN-Kolaborasi antara universitas, KKN-T smart village, dan KKN Mandiri.

Kedelapan tema tersebut dipayungi oleh Al-Islam Kemuhammadiyahan yang menerminkan ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah. Dari delapan tema pengabdian yang ditetapkan, setiap program studi dapat mengembangkan tema tersbut sesuai dengan kepakaran yang dimiliki. Tema tersebut dapat dijabarkan kedalam topik-topik PkM yang kemudian menjadi satu judul kegiatan dalam melaksanakan pengabdian ditengah-tengah masyarakat.

a. Kinerja PkM di FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pengembangan manajemen kelembagaan di Fakultas Agama Islam dimulai sejakan tahun 2010 namun perubahan tersebut dirasakan fase 2016-2020. Hal ini dilihat dari perkembangan hibah dari DRPM dan dimulainya dicanangkan penganggaran hibah internal untuk kegitan riset dan PkM. Selain itu, peningkatan kesadaran dosen dalam

pengembangan penelitian dan PkM mulai tumbuh seiring dengan berbagai pelatihan yang diinisiasi oleh FAI Unismuh. Untuk menunjang pengembangan manajemen dan evalusi kinerja PkM, berikut disajikan data jumlah kegiatan PkM FAI Unismuh:

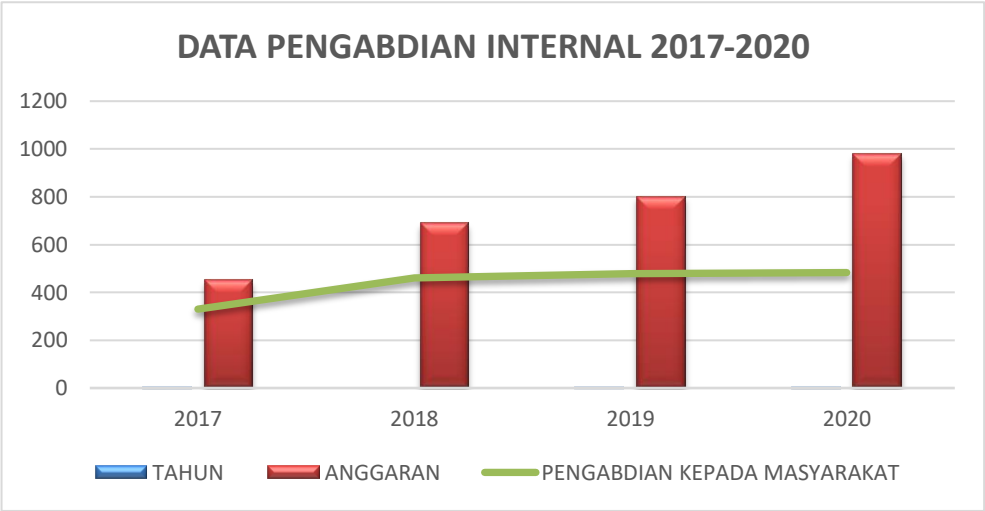

Gambar 3.9 Data Pemerolehan Hibah PkM Internal FAI 2017-2020

Gambar 3.9 menunjukkan pemerolehan hibah PkM yang didanai oleh internal FAI Unismuh dari tahun 2017-2020. Dari data tersebut dapat dilihat statistik pemerolehan hibah yang mengalami peningkatan.

Sedangkan perkembangan dana hibah Eksternal dapat dilihat pada gamaber 3.10 berikut:

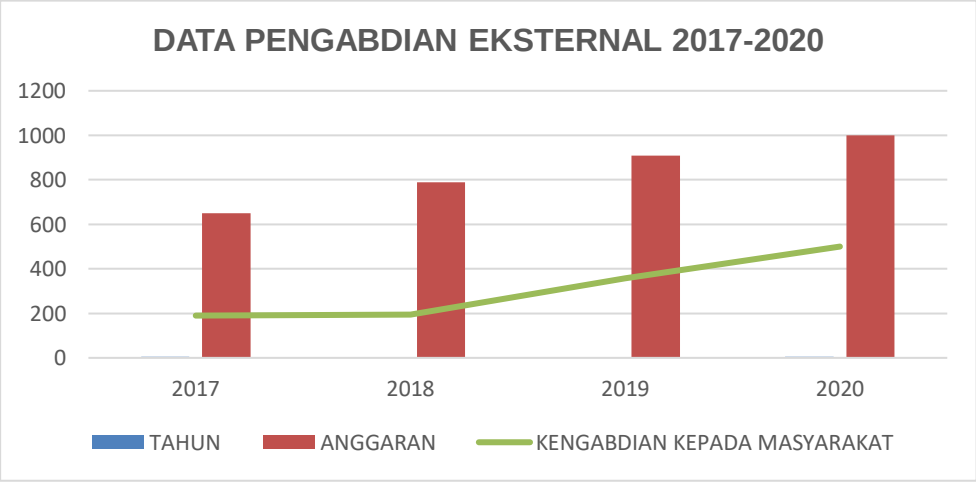

Gambar 3.10 Data Pemerolehan Hibah PkM Eksternal FAI 2017-2020

Pada gambar 3.10 adalah perkembangan hibah PkM yang didanai dari Eksternal FAI Unismuh sejak tahun 2017-2020. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah PkM dan jumlah anggran PKM.

b. Analisis SWOT

Kelemahan	Kekuatan
1. Data base penelitian dosen belum maksimal 2. Sulit memperoleh data dari dosen 3. Peralatan dan kutilitas laboratorium perlu ditingkatkan 4. Publikasi ke jurnal untuk PKM masi rendah. 5. Luaran PKM berupa publikasi di media massamasih rendah 6. Luaran PKM untuk video yang di upload diyoutube masih kurang 7. Partisipasi dosen dalam PKM belum merata 8. Belum terkoordinasinya PKM di masing- masing fakultas/antar fakultas 9. Belum tersedianya unit spin off untuk komersialisasi hasil-hasil PKM 10. Belum terintegrasinya program di fakultas dan pascasarjana dengan PKM dan publikasi 11. Jumlah rekognisi hasil PKM bagi dosen masi sangat terbatas. 12. Kurang dalam penyelenggaraan kegiatan seminat baik nasional maupun internasional 13. Outcome Kerjasama dengan instansi lain belum Nampak untuk PKM. 14. Akreditasi institusi pada level B	1. Jumlah Dosen cukup memadai 2. Pendanaan PKM berasal dari berbagai bersumber 3. Manajemen riset terdiri dari devisi penelitian, pengabdian, dan KI sertatata usaha 4. Banyak dosen dengan kinerja penelitian yang baik (dilihat dari profil SINTA dan partisipasi dosen pada riset-riset kompetitif) 5. Tersedianya media publikasi jurnal nasional terakreditasi dengan jumlah memadai. 6. Fasilitas infrastruktur IT yang memadai 7. Terbentuknya pusat-pusat PKM sesuai dengan kebutuhan 8. Telah mengalokasikan anggaran PKM internal berkelanjutan. 9. Memiliki jumlah dokumen Kerjasamayang memadai dengan mitra 10. Dikungan infrastruktur system informasi penelitian dan pengabdian sangat memuaskan. 11. Kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa suda mulai Nampak. 12. Ketersedian reward bagi pelaksanaPKM dan penulis buku
Ancaman	**Peluang**
1. Persaingan nasional dan global yang semakinketat 2. Perguruan tinggi lain yang lebih progresifdalam pengembangan PKM 3. Sistem penilaian angka kredit 4. Meningkatnya perguruan tinggi yang berlevelutama di Sulawesi Selatan 5. Adanya kebijakan pemerintah yang kurang konsisten (*moving policy*) pada penganggaranpenelitian. 6. Ketatnya aturan penerimaan hibah diKemendikbud Dikti. 7. Peluang perpindahan homebase dosen yang lulus di PTN.	1. Dana penelitian dari luar negeri dandan instansi pemerintah wilayah regional tergolong tinggi 2. Banyaknya tawaran dan peluang kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan publikasi 3. Kebijakan pemerintah yang mendorong dalam bidang penelitian dan publikasi (insentif dll.) 4. Tersedianya insentif penyediaan media publikasi 5. Banyaknya alumni dan industri yang berpotensi untuk diajak bekerjasama terkhusus untuk riset 6. Potensi kolaborasi penyusunan naskah akademik dari Pemda/Kota

Tabel 3.1 Analisis SWOT

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Hasil Evaluasi SWOT

Berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisa SWOT yang disajikan pada Bab 3, menjabarkan berbagai Program Strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Fakultas Agama Islam 2021-2025. Oleh karena itu, Fakultas Agama Islam melakukan berbagai kegiatan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat melalui:

1. Penguatan database kelembagaan berbasis system informasi yang terintegrasi dengan semua prodi;
2. Melakukan revisi, menyempurnakan dan mensosialisasikan regulasi dan roadmap pengabdian pada masyarakat yang dengan mengacu pada SDGs dan berbasis Al Islam dan Kemuhammadiyahan kepada civitas akademika FAI Unismuh;
3. Mencari dukungan (dana/hibah, akses dan insentif) secara terus menerus bagi peningkatan jumlah dan mutu pengabdian;
4. Mendorong secara berkelanjutan untuk meingkatkan partisipasi dosen dalam pengabdian yang bersifat multi-/inter-disipliner dengan melibatkan kalangan mahasiswa;
5. Meningkatkan pengabdian yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah Kota Makassar secara khusus, Sulawesi Selatan, maupun nasional dan internasional;
6. Secara regular melakukan monev, dokumentasi dan pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan meningkatkan kualitas *outcome* hasil PkM.

4.2 Pelaksanaan RIPkM FAI Unsimuh

Fakultas Agama Islam setiap tahunnya terlibat aktif dalam hibah PkM baik hibah internal maupun eksternal Unismuh Makassar, FAI Unismuh telah mengagendakan pelaksanaan PkM di awal-awal tahun. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Agama Islam berasal dari dana internal yang setiap tahun telah dialokasikan di RAPB kampus. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal dilakukan selama satu tahun akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa review proposal, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, masa monitoring dan evaluasi, seminar dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Penerima dana pengabdian kepada masyarakat internal tersebut ditentukan oleh FAI Unismuh yang telah melalui beberapa tahap proses seleksi

sedangkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan eksternal (Universitas/Ditlitabmas) dilakukan sesuai dengan agenda pengabdian kepada masyarakat tahunan yang ditetapkan oleh Kemendikbud Dikti.

Untuk mendaptkan pengakuan proses pelaksanaan PkM di FAI Unismuh, orientasi standar proses perlu dijabarkan. Kinerja pelaksanaan PkM akan diukur berdasarkan delapan standar, yakni: (1) standar hasil; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pelaksana; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan.



Gambar 4.1 Standar PkM

1. Standar Hasil

a. Standar hasil PkM Fakultas Agama Islam merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Hasil PkM sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:

- Menjujung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan yang ditopang Al-Islam dan kemuhammadiyahan;
- Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran civitas akademik yang relevan berdasarkan roadmap penelitannya;
- Pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai hasil dari penelitiannya;
- Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Standar Isi

a. Standar isi PkM Fakultas Agama Islam merupakan kriteria minimal dalam hal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar hasil PkM yang menjungjung tinggi ilmu pengetahuan;
c. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijabarkan dalam Rencan Induk Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
    - Hasil penelitian dari kepakarannya yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
    - Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;
    - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
    - Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
    - Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

3. Standar Proses

a. Standar proses PkM Fakultas Agama Islam adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang meliputi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;

b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
    - Pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam pkm-KKN Tematik dan Akademisi masuk desa'
    - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang kepakarannya yang juga merupakan turunan dari hasil penelitiannya;
    - Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
    - Pemberdayaan masyarakat.

c. Kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada poin (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;

d. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa baik yang teritengrasi dalam KKN Tematik ataupun kegiatan lain sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan akademik di Fakultas Agama Islam;

e. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

f. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar Penilaian

1. Standar penilaian PkM di Fakultas Agama Islam adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM;
2. Penilaian proses dan hasil PkM sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
   - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pkm;
   - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebasdari pengaruh subjektivitas;
   - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pkm;
   - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil PkM selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
4. Kriteria minimal penilaian hasil PKM sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:
   a. Terjadinya perubahan masyarakat ke arah kemandirian masyarakat berupa perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
   b. Tingkat kepuasan masyarakat;
   c. Adanya teknologi Tepat Guna yang diterapkan oleh masyarakat

d. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari hasilpenelitian di masyarakat secara berkelanjutan;
e. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
f. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Penilaian PkM dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM;

5. Standar Pelaksanaan

1. Standar pelaksana PkM Fakultas Agama Islam merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kemampuan pelaksana PkM Fakultas Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
   a. Kualifikasi akademik
   b. Ouput PkM.
3. Kemampuan pelaksana PkM Fakultas Agama Islam sebagaimana dimaksud pada poin (2) menentukan kewenangan melaksanakan PkM.
4. Pelaksana PkM Fakultas Agama Islam sebagaimana dimaksudpada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

6. Standar sarana dan Prasarana

1. Standar sarana dan prasarana PkM Fakultas Agama Islam merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM;
2. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dikelola oleh Devisi Sarana dan Prasana untuk digunakan dalam memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu terkait yang dikelola Fakultas Agama Islam dan area sasaran kegiatan;
3. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas yang dimiliki Fakultas Agama Islam yang dikelola oleh Devisi
4. Sarana Prasarana dan juga dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan

kegiatan penelitian.

5. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar pengelolaan

1. Standar pengelolaan PkM Fakultas Agama Islam merupakan kriteriaminimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
2. Pengelolaan PkM sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaksanakan oleh FAI Unismuh yang dibantu oleh tim dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.
3. Tim yang dimaksud pada poin (2) Devisi PkM yang di SK-kan oleh Rektor;
4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
   a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis pkm perguruan tinggi;
   b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
   c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
   d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
   e. Melakukan diseminasi hasil PkM.
5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM:
6. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pkm yang berprestasi;
7. Mendayagunakan sarana dan prasarana pkm pada lembaga lain melalui kerja sama; dan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, danspesifikasi sarana dan prasarana PkM.
8. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
9. Tim yang dimaksud dalam poin (2) bertugas :
   a. Menyusun rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis FAI Unismuh;
   b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
   c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam

menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM
e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pkm dengan mengacu padastandar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM;
g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

8. Standar pendanaan

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM Fakultas Agama Islam merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Fakultas Agama Islam melalui APB kampus wajib menyediakan dana internal untuk PkM;
3. Selain dari dana internal Fakultas Agama Islam, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalammaupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
4. Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk membiayai:
   a. Perencanaan PkM termasuk seleksi proposal PkM dan KKN-T dan PkM Prioritas;
   b. Pelaksanaan PkM;
   c. Pengendalian PKM;
   d. Pemantauan dan evaluasi PKM;
   e. Pelaporan PKM; dan
   f. Diseminasi hasil PKM.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama Islam yang dilaksanakan oleh LP3M.

4.3. Penguatan system informasi RIPkM

Untuk memudahkan pelaksanaan seleksi proposal PKM, FAI Unismuh telah

mengembangkan system infromasi penelitian dan pengabdian dengan nama SIMPELMAS. Sistem tersebut digunakan untuk mengirim proposal secara online dan diseleksi oleh reviewer yang telah di SK-kan oleh Rektor.

BAB V PENUTUP

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan RIPkM (Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat) Fakultas Agama Islam. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) oleh telah dapat dilaksanakan secara bertahap dengan baik, sekalipun dirasakan masih belum sempurna, semoga dapat meningkatkan motivasi para dosen dan juga para mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini harus dilakukan dengan penuh kepedulian dantanggung jawab agar menghasilkan luaran (*outcome*) sesuai visi, misi, tujuan dan rencana strategis Fakultas Agama Islam. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat terus ditingkatkan, agar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) 2021-2025 yang telah berhasil disusun merupakan dokumen formal perencanaan pengabdian kepada masyarakatjangka menengah yang mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Fakultas Agama Islam, Rencana Induk Pengembangan Universitas dan keputusan pimpinan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. RIPkM Fakultas Agama Islam ini dijadikan sebagai panduan pelaksanaan semua program yang terkait pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran penting kesiapan organisasi dan sumber daya manusia terutama di dalam proses implementasi pengabdian kepada masyarakat. RIPkM ini ditujukan bagi dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang akan menyusun usulan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dapat meningkatkan kemandirian kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/KEP/B/I.O/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019. Buku Panduan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) DIKTI. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Edisi X Tahun 2016. Social Development Goals (SDGs) untuk tahun 2016 – 2030

Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional